

## 5. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### A. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan sekitar 198.441 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut sekitar 10.216.57 km<sup>2</sup> yang dibagi ke dalam 10 kabupaten dan empat kota. Dataran Provinsi Kalimantan Timur umumnya terdiri dari pegunungan dan bukit yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Disamping itu provinsi ini juga mempunyai ratusan sungai yang juga tersebar hampir di semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama disamping angkutan darat.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Jika di tahun 2000, jumlah penduduk tercatat sebesar 2.436.545 jiwa, maka di tahun 2008 meningkat menjadi 3.044.961 jiwa. Disamping pertumbuhan penduduk, provinsi ini pun mengalami perubahan fungsi lahan yang cukup signifikan dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi alam provinsi ini.

Selama kurun waktu 1994-2004, wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan fungsi lahan sebagai berikut:

- Berkurangnya kawasan hutan seluas 1, 85 juta Ha (11,52%)
- Bertambahnya kawasan pemukiman menjadi 52,53 ribu Ha (165,22%)
- Bertambahnya kawasan perkebunan seluas 233, 55 Ha (6.926,31%)
- Berkurangnya kawasan pertanian lahan basah (sawah) seluas 357,25 Ha (-79,16%)
- Berkurangnya hutan mangrove menjadi tambak seluas 235,03 ribu Ha (42.347,64%)
- Bertambahnya kawasan tanah terbuka dan areal bekas tambang seluas 31,43 ribu Ha (416%)

Akibat perubahan yang sangat besar mengakibatkan terganggunya keseimbangan tata air dan berkurangnya sumber daya air serta intrusi air laut di sejumlah kabupaten/kota. Dengan kondisi alam seperti ini yang diiringi dengan tingkat eksploitasi dan eksplorasi lahan, maka Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya sangat rawan terhadap bencana alam maupun non alam.

### B. POTENSI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### 1. Deskripsi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 113<sup>0</sup>44 Bujur Timur dan 119<sup>0</sup>00 Bujur Barat serta diantara 4<sup>0</sup>24 Lintang Utara dan 2<sup>0</sup>25 Lintang Selatan. Provinsi ini terletak di sebelah paling timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, khususnya negara Sabah dan Serawak. Dataran Kalimantan Timur terdiri dari Gugusan gunung dan pegunungan serta memiliki ratusan sungai yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Kalimantan Timur memiliki iklim tropis dengan musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia lainnya, dan umumnya bersuhu 17,90<sup>0</sup>C hingga 35,40<sup>0</sup>C. Provinsi ini juga memiliki habitat hutan yang sangat luas.

## 2. Potensi Bencana Alam di Provinsi Kalimantan Timur

Menilik kondisi alam Provinsi Kalimantan Timur dan degradasi alam yang ditemukan di wilayah ini, tidak mengherankan jika provinsi ini menyimpan potensi bencana yang cukup besar. Dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap wilayah ini maka terdapat beberapa potensi bencana yang ada di wilayah ini:

### 2.1. Banjir

Bencana banjir selama sepuluh tahun terakhir sering melanda seluruh wilayah kabupaten/kota setiap tahunnya. Bencana ini bersifat temporer dan terjadi di setiap awal musim penghujan dan umumnya terjadi antara 2 hingga 6 hari. Daerah-daerah yang diidentifikasi sering mengalami banjir dan paling rawan banjir adalah kawasan perkotaan di sepanjang hilir sungai dan pesisir laut.

Berdasarkan data yang ada untuk tahun 2007, Provinsi Kalimantan Timur mengalami banjir sebanyak 20 kali dengan jumlah korban sekitar 80.170 (KK) atau 375.833 jiwa. Sementara untuk tahun 2008, sudah terjadi 4 kali banjir dengan jumlah korban sebanyak 2.232 KK atau 7.799 jiwa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel L5.1**  
**Kejadian Bencana Banjir Beserta Dampaknya Tahun 2007-2008**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban (Jiwa)	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1	Kota Samarinda	59.708	26
2	Kota Balikpapan	15.000	4.968
3	Kota Tarakan	-	56
4	Kab. Kutai Kartanegara	135.636	735
5	Kab. Kutai Timur	9.875	-
6	Kab. Kutai Barat	138.501	-
7	Kab. Paser	2.045	2.125
8	Kab. Berau	9.875	-
9	Kab. Nunukan	12.840	-
	Total	375.833	7.799

Sumber: Hasil Analisis

### 2.2. Tanah Longsor

Di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah yang rentan terhadap tanah longsor adalah Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sengata dan Sendawar. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, untuk tahun 2007, telah terjadi musibah tanah longsor sebanyak 6 kali dengan jumlah korban sebanyak 2.195 KK atau 7.647 jiwa dengan jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang. Untuk tahun 2008, frekuensi kejadian tanah longsor terjadi sebanyak 8

kali dengan jumlah korban sebanyak 30 KK atau 111 jiwa. Potensi kejadian ini di masa yang akan datang kemungkinan akan bertambah mengingat terjadinya perubahan fungsi lahan yang cukup besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

### **2.3. Tsunami**

Walaupun wilayah Kalimantan berdasarkan kondisi geologisnya merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, akan tetapi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami harus tetap diwaspadai terutama di kawasan pesisir laut sekitar Tarakan, karena diidentifikasi pada kawasan tersebut memiliki sesar aktif yang berpotensi gempa tektonik.

### **2.4. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang berulang di Kalimantan Timur pada musim kemarau. Jika ditinjau dari sisi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tidak semata-mata disebabkan oleh ulah manusia, tetapi juga oleh kondisi alam. Pada musim kemarau, suhu udara di beberapa wilayah di Kalimantan Timur bahkan mencapai 34.5<sup>0</sup>C hingga 39.5<sup>0</sup>C. Dari data yang dikeluarkan oleh UPTD PKLH Samarinda, sepanjang tahun 2006 ditemukan *hot spot* (lokasi kebakaran vegetasi) sebanyak 6.191 sementara tahun 2007 ditemukan 1.461 titik. Untuk tahun 2008, hingga bulan Juli telah ditemukan 139 *hot spot*. Kebakaran hutan selama ini telah banyak menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, lingkungan, ekologi maupun kesehatan masyarakat.

## **C. EVALUASI SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dari sebaran kejadian dan potensi bencana yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki jenis bencana alam yang relatif lebih sedikit dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Namun mengingat alih fungsi lahan yang cukup tinggi, maka potensi bencana akan semakin tinggi sehingga pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi untuk mencegah dan mengatasi bencana yang sudah sering terjadi.

### **1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kebijakan penanggulangan bencana akan ditinjau dari beberapa sisi yaitu dari sisi berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang bencana itu sendiri, kebijakan lain yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana serta kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran di bidang kebencanaan. Untuk selanjutnya akan dideskripsikan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun dan diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.1. Peraturan tentang Penanggulangan Bencana**

Bila ditinjau dari sisi peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana, maka saat ini pemerintah Provinsi sudah menyusun draft Perda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Timur. Inisiatif ini didasari oleh seringnya bencana ini terjadi dan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan.

Untuk kebijakan setingkat Perda yang mengatur tentang bencana jenis lainnya, atau mengatur bencana secara umum belum ada dan belum menjadi agenda bagi pemerintah Kalimantan Timur.

### **1.2. Kebijakan Terkait Lainnya**

Pada dasarnya terdapat berbagai kebijakan yang terkait erat serta mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan tata ruang. Untuk Provinsi Kalimantan Timur saat ini pemerintah sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2008-2027. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap tata ruang yang ada terlihat bahwa aspek bencana telah menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan dalam penyusunan rencana tata ruang.

### **1.3. Sistem Kelembagaan**

Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah membentuk Satkorlak sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatasi bencana, maka dengan dikeluarkannya UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi perubahan lembaga dari Satkorlak menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pasal 18).

Ternyata amanat UU No.24 Tahun 2007 ini belum diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena terbukti dari evaluasi terhadap SOTK yang baru disahkan oleh DPRD, peran ini masih diberikan kepada Satkorlak dan kesbanglinmas seperti aturan kelembagaan sebelumnya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Provinsi Kaltim memilih untuk menunggu pedoman teknis pembentukan BPBD untuk menghindari kesalahan implementasi dan kesalahan pemahaman akan tupoksi BPBD dan eselonisasi bagi pejabat yang akan duduk di dalam BPBD.

Untuk fungsi penanggulangan bencana, terutama untuk tahap tanggap darurat dan pasca bencana masih tetap diemban oleh sejumlah SKPD dan masih menerapkan pola koordinasi yang telah diterapkan sebelumnya.

### **1.4. Kebijakan di Bidang Penganggaran**

Sebuah kebijakan tanpa disertai anggaran akan sulit mencapai tujuannya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, untuk Provinsi Kalimantan Timur masalah ini tetap menjadi satu isu yang penting untuk dipecahkan karena memang belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang alokasi anggaran untuk bencana. Anggaran untuk program/kegiatan yang terkait kebencanaan, tersebar di SKPD yang memiliki TUPOKSI kebencanaan dan belum

tentu diperoleh secara reguler tiap tahun. Namun jika Perda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan disahkan maka kemungkinan akan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana akan semakin besar, setidaknya untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

## **2. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, maka perlu disusun sejumlah strategi. Dalam kegiatan kajian ini, maka strategi yang dimaksud adalah menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan di daerah, karena dengan cara seperti ini maka keberlangsungan program dan kegiatan akan terwujud, disamping juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

### **2.1. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki rencana tertentu yang memang secara khusus untuk penanggulangan bencana, baik itu untuk bencana alam maupun non alam.

### **2.2. Rencana Kerja Tahunan SKPD**

Kegiatan penanggulangan bencana sudah menjadi bagian dari Renja SKPD meskipun rencana tersebut masih bersifat sektoral dan lebih mengarah pada upaya antisipatif. Dari sebagian besar program dan kegiatan yang ada di SKPD, sebagian besar diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran dan banjir serta tanah longsor. yang memang menjadi bencana tahunan di Kalimantan Timur.

### **2.3. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana secara reguler tersebar di seluruh SKPD terkait, sesuai dengan TUPOKSI-nya. Besaran anggaran masih terbatas untuk kegiatan rutin yang mendukung TUPOKS. Bila terjadi bencana bisa juga diambilkan dari post biaya takterduga yang dimiliki oleh SKPD dan Sekda.

## **3. SISTEM OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan sistem operasional penanggulangan bencana adalah prosedur-prosedur tetap yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan bencana, tata komando dan tata komunikasi serta aspek-aspek operasional lainnya.

### **3.1. Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana**

Sama seperti di wilayah lain di Indonesia, untuk penanggulangan bencana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menggunakan berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai sejumlah Departemen yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana. Disamping menggunakan pedoman dari departemen pusat, provinsi Kalimantan Timur juga menyusun sebuah pedoman yang terkait dengan

penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu pedoman penentuan kriteria siaga kebakaran hutan dan lahan.

### 3.2. Tata Komando dan Komunikasi Penanggulangan Bencana

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, saat ini lembaga yang mengemban tugas penanggulangan bencana di provinsi Kalimantan Timur adalah Satkorlak dan Kesbanglinmas dan ini tentu saja mempengaruhi tata komando dan komunikasi penanggulangan bencana. Saat ini tata komando jika terjadi bencana ada pada Ketua Satkorlak dengan, Kesbanglinmas sebagai leading sektor. Sebagai pelaksana langsung adalah SKPD terkait sesuai dengan bidang keahliannya. Komunikasi inter dan intra SKPD relatif lancar dan bersifat koordinatif, masing-masing SKPD akan mengambil peran sesuai dengan TUPOKSI-nya.

## D. EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah sistem maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas implementasi dari sistem tersebut. Dalam kajian ini terdapat sejumlah aspek yang digunakan dan hasil dari evaluasi atas implementasi tersebut dapat dilihat dalam tabel- tabel berikut ini:

### 1. Evaluasi Aspek Kebijakan

Evaluasi dari aspek kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek	Hasil Evaluasi
1	Efektifitas kebijakan dalam mengurangi risiko bencana dan saat bencana terjadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama ini kebijakan penanggulangan bencana masih bersifat antisipatif belum kebijakan yang bersifat preventif.</li> </ul>
2	Hambatan dalam penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (pusat maupun daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak terjadi ketidak sesuaian antara desain yang diharapkan oleh pusat dengan realitas pelaksanaan di daerah.</li> <li>Perbedaan cara pandang ini membuat pemerintah daerah bersifat menunggu kebijakan lanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah</li> </ul>
3	Sinergi implementasi antar peraturan (adakah yang saling kontraproduktif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada kontraproduktif antara peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi/lembaga dan departemen terutama terkait dengan kelembagaan</li> </ul>
4	Tingkat dukungan politik terkait kebijakan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk provinsi Kalimantan Timur, pemerintah masih menjadi penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dengan <i>stakeholder</i> lain masih belum dibina secara</li> </ul>

		maksimal.
5	Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya ketidak-sesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan pusat (antara lembaga/instansi dan departemen) berdampak pada lemahnya komitmen dan kepercayaan dari daerah</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis

## 2. Evaluasi Aspek Strategi

Evaluasi dari aspek strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek	Hasil Evaluasi
1	Proses penyusunan rencana-rencana di bidang penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana khusus untuk penanggulangan bencana belum disusun. SKPD menyusun kegiatan sebatas untuk mendukung TUPOKSI.</li> <li>Program dan kegiatan direncanakan/diusulkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan TUPOKSI-nya</li> <li>Usulan dari SKPD akan diverifikasi oleh Bapeda dan Tim Anggaran Daerah</li> </ul>
2	Mekanisme integrasi rencana strategis penanggulangan bencana ke dalam renja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karena tidak ada rencana strategis yang secara khusus diarahkan untuk bencana maka tidak ada mekanisme khusus untuk integrasi rencana strategis ke dalam renja SKPD</li> </ul>
3	Hambatan dalam penyusunan rencana dan implementasi rencana penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karena kegiatan diusulkan secara sektoral oleh SKPD, maka masih ditemui adanya tumpang tindih kegiatan yang serupa</li> </ul>
4	Hambatan dalam alokasi anggaran terkait dengan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi anggaran untuk kebencanaan tersebar di SKPD terkait. Selama ini SKPD merasakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. Tidak ada alokasi khusus untuk bencana</li> </ul>
5	Hambatan dalam meraih komitmen SKPD dan mekanisme koordinasi dalam melaksanakan rencana-rencana penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada hambatan klasik mengenai eselonisasi</li> <li>Masih terdapat hambatan koordinasi akibat ego sektoral.</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis

### 3. Evaluasi Aspek Operasional

Evaluasi dari aspek operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek	Hasil Evaluasi
1	Hambatan dalam implementasi protap di lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protap yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, namun untuk tahap selanjutnya perlu disusun prosedur baku yang akan menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana</li></ul>
2	Hambatan dalam implementasi tata komando dan tata komunikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara umum tata komando dan komunikasi sudah berjalan meskipun masih diwarnai dengan ego sektoral.</li></ul>

Sumber: Hasil Analisis